

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN HASIL AUDIT BPK
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

SKRIPSI

Oleh

ABU ACHMAD



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT SIZE, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, AND AUDIT RESULTS TO FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT (Empirical Study of District/City Government in Lampung Province)

By

ABU ACHMAD

This study aims to provide empirical evidence of the influence of local government size, intergovernmental revenue, audit findings, and audit opinion of BPK on the financial performance of district/city governments in Lampung Province. Financial performance is measured by using four ratios: independence, economy, efficiency, and effectiveness ratio.

The method used in this study is multiple regression with panel data and fixed effect model to the 15 district/city governments in Lampung Province during 2011-2015. The results showed that size of local government and audit opinion of BPK have positive effect, while audit findings of BPK have negative effect on financial performance of district/city government in Lampung Province. Intergovernmental revenues has no effect to the financial performance of district/city government in Lampung Province.

Keywords: financial performance, size of local government, intergovernmental revenue, audit findings, audit opinion

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, DAN HASIL AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)

Oleh

ABU ACHMAD

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, temuan, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan empat rasio yaitu rasio kemandirian, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda data panel dengan model *fixed effect* terhadap 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sedangkan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: kinerja keuangan, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, temuan audit, opini audit

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN HASIL AUDIT BPK
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

ABU ACHMAD

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, DAN HASIL AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Abu Achmad**

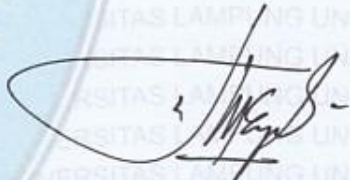
Nomor Pokok Mahasiswa: 1511031151

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




Dr. Ratna Septiyanti, S. E., M. Si., Akt.
NIP 19740922 200303 2 002


Mega Metalia, S. E., M. Si., M. S. Ak., Akt.
NIP 19780309 200812 2 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ratna Septiyanti, S. E., M. Si., Akt.**

fah
.....

Sekretaris : **Mega Metalia, S. E., M. Si., M. S. Ak., Akt**

[Signature]
.....

Penguji Utama : **Kiagus Andli, S. E., M. Si., Akt.**

[Signature]
.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



[Signature]

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 196109041987031011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 September 2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2017
Penulis,



Abu Achmad
NPM 1511031151

RIWAYAT HIDUP



Abu Achmad, lahir di Purworejo pada tanggal 21 Maret 1990 dari pasangan Bapak Sabar S. dan Ibu Siti Khotijah, merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Tangkisan pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Purworejo yang diselesaikan pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Purworejo hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis memulai karir sebagai Auditor Pelaksana pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, sampai akhirnya pada tahun 2015 memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project (STAR)* yang diselenggarakan oleh BPKP bekerja sama dengan *Asian Development Bank (ADB)*.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberi semangat, dukungan, serta pemikiran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA., selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
6. Ibu Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Akt., selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, pengetahuan,

nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.

7. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt., selaku Penguji Utama. Terima kasih atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
8. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua, Bapak Sabar S. dan Ibu Siti Khotijah yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi di Universitas Lampung ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, kehangatan, dan segalanya yang tidak bisa ananda ungkapkan melalui kata-kata. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Bapak Ibu di dunia dan akhirat.
10. Istriku tercinta, Yeny Nurfiana Dewi dan putraku tersayang, Muhammad Radifka Alfarisi, terima kasih atas segala keceriaan dan kebahagiaan yang selalu terpancar serta selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini serta. Kalian berdua adalah sumber sumber inspirasiku, penyemangatku, yang selalu membuatku yakin bahwa aku akan selalu dapat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
11. Bapak Lubar Wibowo dan Ibu Wagini, yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi di Universitas Lampung ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, dan kehangatan.
12. Kakak-kakaku, Abdul Kharis, Achmad Royan, dan Sugeng Hariyadi, terima kasih selalu menjadi saudara dan sahabat yang terbaik, yang selalu ada di kala suka maupun susah, serta selalu menyenangkan untuk diajak bertukar pikiran serta pengetahuan.

13. Teman-teman seperjuangan, STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung, atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan kalian selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala bentuk saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, September 2017

Penulis,

Abu Achmad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRACT	
ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Teori Keagenan	9
2.2. Kinerja Keuangan	11
2.2.1. Ukuran Pemerintah Daerah	12
2.2.2. <i>Intergovernmental Revenue</i>	13
2.2.3. Hasil Audit BPK	21
2.2.3.1. Temuan Audit	21
2.2.3.2. Opini Audit	22
2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.4. Pendapatan Asli Daerah	27
2.5. Penelitian Terdahulu	28
2.6. Kerangka Pemikiran	34
2.7. Hipotesis	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Definisi dan Operasional Variabel	41
3.2.1. Variabel Independen	41
3.2.2. Variabel Dependen	44
3.3. Pengukuran Variabel	46
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data	47
3.6. Metode Analisis Data	48
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif	48
3.6.2. Analisis Faktor	49
3.6.3. Pemilihan Model Regresi	50
3.6.3.1. <i>Chow Test</i>	50
3.6.3.2. <i>Hausman Test</i>	51
3.6.3.3. <i>Lagrange Multiplier Test</i>	51
3.6.4. Pengujian Asumsi Klasik	52
3.6.4.1. Uji Normalitas	52
3.6.4.2. Uji Multikolinieritas	52
3.6.4.3. Uji Autokorelasi	53
3.6.4.4. Uji Heteroskedastisitas	53
3.6.5. Analisis Regresi Berganda	54
3.6.6. Pengujian Hipotesis	54
3.6.6.1. Uji Signifikansi - F	54
3.6.6.2. Pengujian Koefisien Regresi (Uji Signifikansi - t)	55
3.6.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Deskripsi Data	57
4.2. Hasil dan Analisis Data	58
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	59
4.2.2. Analisis Faktor	63
4.2.3. Transformasi Data	66
4.2.4. Pemilihan Model Regresi	68

4.2.4.1. Uji <i>Chow</i> (<i>Chow Test</i>)	69
4.2.4.2. Uji <i>Hausman</i> (<i>Hausman Test</i>)	69
4.2.5. Pengujian Asumsi Klasik	70
4.2.5.1. Uji Normalitas	71
4.2.5.2. Uji Multikolinieritas	72
4.2.5.3. Uji Autokorelasi	73
4.2.5.4. Uji Heteroskedastisitas	74
4.2.6. Analisis Regresi Berganda	75
4.2.7. Pengujian Hipotesis	77
4.2.7.1. Uji Signifkansi - F	78
4.2.4.2. Uji Koefisien Regresi (Uji Signifikansi - t)	78
4.2.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81
4.2.8. Pembahasan	82
4.2.8.1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	82
4.2.8.2. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	83
4.2.8.3. Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	85
4.2.8.4. Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	86
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	88
5.1. Simpulan	88
5.2. Saran	89
5.2.1. Keterbatasan Penelitian	90
5.2.2. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2014-2015	3
2. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2015	5
3. Daftar Penelitian Terdahulu	28
4. Nilai Opini Audit	43
5. Pengukuran Variabel	46
6. Rincian Jumlah LKPD	58
7. Deskripsi Statistik Data Penelitian	59
8. Hasil KMO MSA dan <i>Bartlett Test Of Sphericity</i>	64
9. Tabel <i>Anti-Image Matrix</i>	65
10. Hasil KMO MSA dan <i>Bartlett Test Of Sphericity</i>	65
11. Uji Normalitas Data	66
12. Uji Autokorelasi	67
13. Uji Heteroskedastisitas	67
14. Uji <i>Chow</i>	69
15. Uji <i>Hausman</i>	70
16. Uji Normalitas Data	71
17. Uji Multikolinieritas	72
18. Uji Autokorelasi	73
19. Uji Heteroskedastisitas	75
20. Hasil Regresi Berganda Model <i>Fixed Effect</i>	76

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Penelitian Variabel Ukuran Pemerintah Daerah.....	L-1
2. Data Penelitian Variabel <i>Intergovernmental Revenue</i>	L-2
3. Data Penelitian Variabel Temuan Audit	L-3
4. Rekapitulasi Temuan Audit	L-4
5. Data Penelitian Variabel Opini Audit	L-5
6. Data Penelitian Rasio Kemandirian	L-6
7. Data Penelitian Rasio Ekonomi	L-7
8. Data Penelitian Rasio Efisiensi	L-8
9. Data Penelitian Rasio Efektivitas.....	L-9
10. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	L-10
11. Hasil Uji KMO MSA DAN BARTLETT TEST OF SPHERICITY ...	L-11
12. Hasil Uji Normalitas	L-12
13. Hasil Uji Multikolinieritas	L-13
14. Hasil Uji Autokorelasi	L-14
15. Hasil Uji Heteroskedastisitas	L-15
16. Hasil Uji <i>Chow</i>	L-16
17. Hasil Uji <i>Hausman</i>	L-17
18. Hasil Uji Hipotesis	L-18
19. Surat Izin Penelitian	L-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Namun, pada kenyataannya di Indonesia, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat (dana perimbangan). Hal ini sering dijumpai pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung lebih kecil dari dana perimbangan. Rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut masih rendah.

Pemerintah daerah seolah-olah tidak terlalu semangat menggenjot penerimaan PADnya. Mereka cenderung manja dengan hanya menunggu penerimaan dana

dari pemerintah pusat. Seringkali dapat dilihat di APBD suatu daerah dimana proporsi PAD selalu lebih kecil dari pada dana perimbangan.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pemerintah pusat menunjukkan tingkat kemandirian yang masih rendah. Rendahnya tingkat kemandirian menggambarkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan operasionalnya masih sangat bergantung pada sumber dana dari pihak eksternal. Kinerja keuangan juga menjadi sorotan dari masyarakat terutama yang terkait dengan pelayanan publik.

Ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan juga menyebabkan pemerintah daerah sangat kurang mampu menyediakan dana untuk membiayai pembangunan daerah. Ketika APBD terlalu mengandalkan dana perimbangan, maka perkiraan belanja dapat meleset, karena penerimaan pendapatannya berubah-ubah yang mungkin salah satunya diakibatkan oleh penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga akan mengakibatkan pemotongan anggaran dan mengganggu kinerja pemerintah daerah tersebut.

Pada tanggal 16 Agustus 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa dilakukan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 untuk 169 daerah dengan nilai sebesar Rp19.418.975.064.500,00. Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu termasuk daerah yang mengalami penundaan penyaluran DAU. Penundaan ini tentu akan mempengaruhi struktur pendanaan yang telah dianggarkan sehingga

akan mempengaruhi program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

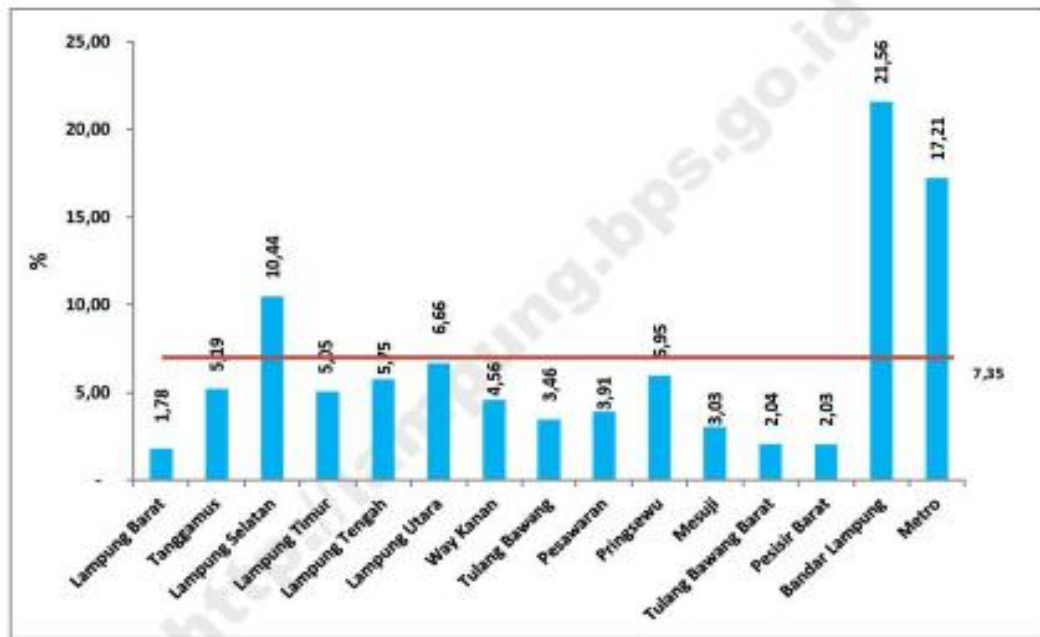
Proporsi PAD terhadap penerimaan daerah yang sangat kecil dan berbanding terbalik dengan proporsi Dana Perimbangan terhadap penerimaan daerah yang begitu besar juga terjadi di pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1. PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2015 (RIBU RUPIAH)

Rincian	2014	2015	Perubahan (%)
PENERIMAAN DAERAH	16.353.358.445,45	18.500.550.842,90	13,13
Pendapatan Daerah	15.077.794.005,18	17.374.445.306,07	15,23
Pendapatan Asli Daerah	1.174.862.546,34	1.276.832.335,17	8,68
Dana Perimbangan	11.243.462.592,67	12.165.893.796,58	8,20
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.659.468.866,17	3.931.719.174,32	47,84
Penerimaan Pembiayaan	1.275.564.440,27	1.126.105.536,83	(11,72)
PENGELUARAN DAERAH	14.720.871.216,51	17.414.130.037,11	18,30
Belanja Tidak Langsung	8.093.046.239,68	9.334.799.715,00	15,34
Belanja Langsung	6.446.945.088,83	7.700.893.681,35	19,45
Pengeluaran Pembiayaan	180.879.888,00	378.436.640,76	109,22

Sumber : <http://lampung.bps.go.id>

Besaran nilai rasio PAD terhadap total pendapatan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



GAMBAR 1.1. RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG, 2015

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu 21,56% sedangkan Kabupaten Lampung Barat memiliki rasio kemandirian paling rendah yaitu 1,78%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diterbitkanlah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini dan laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 diuraikan opini untuk masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang dijabarkan pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2. DAFTAR OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

No	Kabupaten/Kota	Opini Tahun 2015
1	Kab. Lampung Barat	WTP
2	Kab. Lampung Selatan	WDP
3	Kab. Lampung Tengah	WDP
4	Kab. Lampung Timur	WDP
5	Kab. Lampung Utara	WTP
6	Kab. Mesuji	WTP
7	Kab. Pesawaran	WDP
8	Kab. Pesisir Barat	TMP
9	Kab. Pringsewu	WTP
10	Kab. Tanggamus	WTP
11	Kab. Tulang Bawang	WTP
12	Kab. Tulang Bawang Barat	WTP
13	Kab. Way Kanan	WTP
14	Kota Bandar Lampung	WTP
15	Kota Metro	WTP

Sumber : www.bpk.go.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 10 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sisanya sebanyak 4 kabupaten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 kabupaten mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yaitu Kabupaten Pesisir Barat.

Dari data-data di atas, dapat kita bandingkan bahwa Kota Bandar Lampung yang memiliki rasio kemandirian tertinggi juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2015. Sedangkan Kabupaten Lampung Barat yang memiliki rasio kemandirian paling rendah tetapi malah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2015. Hal berbeda juga terlihat pada Kabupaten Pesisir Barat yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) untuk LKPD tahun 2015 tetapi justru memiliki rasio kemandirian sebesar 2,03% lebih baik daripada Kabupaten Lampung Barat.

Hal yang cukup menjadi perhatian juga yaitu Kabupaten Pringsewu yang mengalami penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum untuk tahun 2016, tetapi memiliki rasio kemandirian yang cukup baik yaitu 5,95% dan mendapatkan juga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2015.

Penelitian terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, temuan, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memang sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia tetapi sebagian besar penelitian tersebut menggunakan proksi kinerja keuangan pemerintah daerah hanya dengan salah satu rasio *value for money* atau skor kinerja pemerintah daerah yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian yang menggunakan empat rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pernah dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016). Hasil penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) adalah variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan tetapi variabel kemakmuran, *intergovernmental revenue*, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) tetapi dengan menggunakan objek penelitian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang lebih tepat untuk model data panel dibandingkan metode penelitian Masdiantini dan Erawati (2016).

Berdasarkan uraian di atas, belum terlihat keterkaitan hubungan yang jelas antara rasio kemandirian, penyaluran dana perimbangan, dan opini audit BPK. Oleh

karena itu, tema permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota?
2. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota?
3. Apakah temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota?
4. Apakah opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota,
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota,

3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota, dan
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pemerintah pusat, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten/kota terutama dalam hal penyelenggaraan kinerja keuangannya. Dengan demikian dapat menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan yang diambil.
2. Pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
3. Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bahan informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Akademis, penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya tentang variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan hasil audit BPK terhadap kinerja keuangan dijelaskan melalui perspektif teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu atau beberapa orang pemilik sumber daya ekonomis (sebagai prinsipal) dengan orang lain (sebagai agen) dimana prinsipal memerintah agen untuk melakukan kegiatan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut. Moe (1984) memberikan beberapa contoh hubungan agen dan prinsipal dalam teori agensi yaitu pengacara (sebagai agen) dengan klien (sebagai prinsipal), politikus (sebagai agen) dengan masyarakat (sebagai prinsipal), karyawan (sebagai agen) dengan majikan/pengusaha (sebagai prinsipal).

Dengan adanya pemisahan kepemilikan oleh prinsipal dengan pengendalian oleh agen di dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, agen secara

moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal, tetapi disisi lain, agen (manajemen) juga akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan diri mereka sendiri. Kondisi ini cenderung akan menimbulkan masalah agensi.

Hubungan antara prinsipal dan agen juga biasa diterapkan dalam organisasi sektor publik (Broadbent dkk, 1996). Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi agen adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi prinsipal adalah masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan seharusnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Dalam penelitian ini teori keagenan menjadi *grand* teori. Masyarakat sebagai prinsipal mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk dapat menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

Dua sisi kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan konflik. Masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat seringkali kecewa dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung lebih mementingkan kesejahtraannya sendiri dan melalaikan kepentingan masyarakat umum. Hal ini dapat terlihat sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki belanja pegawai di atas 50% melebihi belanja untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaporan kinerja dari pemerintah daerah

selaku agen menjadi sebuah hal yang penting. Agen harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat (prinsipal). Untuk dapat mengurangi dan mencegah konflik kepentingan ini maka diperlukan regulasi yang akan menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah. Lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan memegang peranan pengendalian terhadap kinerja keuangan. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya.

2.2. Kinerja Keuangan

Kinerja mempunyai pengertian sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertulis dalam rencana strategis suatu organisasi (Mahsun, 2016:25). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau keberhasilan individu, kelompok, maupun organisasi. Kinerja dapat diukur apabila organisasi telah menetapkan kriteria keberhasilan.

Sularso dan Restianto (2011) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Terdapat pandangan yang mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produktivitas pada organisasi sektor publik

menimbulkan perhatian yang cukup besar terhadap pengukuran kinerja pemerintah daerah (Halachmi, 2005). Senada dengan pernyataan tersebut, Gianakis (2002) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik.

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan PAD yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

2.2.1. Ukuran Pemerintah Daerah

Kusumawardani (2012) menjelaskan bahwa *size* adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut. Menurut Patrick (2007) ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi. Ukuran organisasi dapat diukur dengan berbagai cara antara lain jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produksi. Menurut Kristanto (2009) dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintah dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dalam setahun. Sedangkan menurut Hidayat dan

Isroah (2016) nilai dari ukuran perusahaan dapat diperoleh dari total aset perusahaan karena nilai aset cenderung lebih stabil.

Berbagai cara untuk menilai ukuran organisasi juga dapat digunakan untuk menilai ukuran pemerintah daerah, salah satunya dengan total aset. Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan dan kewajiban yang lebih besar pula dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik. Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya dalam laporan keuangan.

2.2.2. Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue atau yang sering kita kenal sebagai dana perimbangan, merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). DBH yang bersumber dari pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21.

Besaran alokasi DBH yang bersumber dari pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan tanggal 9 Desember 2005. Alokasi DBH yang bersumber dari PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

Alokasi DBH yang bersumber dari BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Alokasi DBH yang bersumber dari PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH yang bersumber dari sumber daya alam dapat berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Besaran alokasi DBH yang bersumber dari sumber daya alam diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan tanggal 9 Desember 2005.

DBH yang bersumber dari Kehutanan berasal dari:

a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Alokasi DBH yang bersumber dari Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian yaitu 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Alokasi DBH yang bersumber dari Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian yaitu 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c. Dana Reboisasi (DR).

Alokasi DBH yang bersumber dari Kehutanan yang berasal dari DR sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

DBH yang bersumber dari Pertambangan Umum berasal dari:

a. Iuran Tetap (*Land-rent*)

Alokasi DBH dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian yaitu 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Alokasi DBH dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% untuk provinsi yang bersangkutan.

b. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*)

Alokasi DBH dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian yaitu 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Alokasi DBH dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian yaitu 26% untuk provinsi yang bersangkutan dan 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH yang bersumber dari Perikanan berasal dari :

a. Pungutan Pengusahaan Perikanan

Alokasi DBH dari Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

b. Pungutan Hasil Perikanan

Alokasi DBH dari Pungutan Hasil Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

DBH yang bersumber dari pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Alokasi DBH tersebut sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian yaitu 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisanya

sebesar 0,5% dibagi dengan rincian yaitu 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH yang bersumber dari pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Alokasi DBH tersebut sebesar 15% dibagi dengan rincian yaitu 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisanya sebesar 0,5% dibagi dengan rincian yaitu 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH yang bersumber dari pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Alokasi DBH tersebut sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian yaitu 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisanya sebesar 0,5% (setengah persen) dibagi dengan rincian yaitu 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH yang bersumber dari pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah

provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Alokasi DBH tersebut sebesar 30% dibagi dengan rincian yaitu 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisanya sebesar 0,5% dibagi dengan rincian yaitu 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

DBH yang bersumber dari pertambangan panas bumi berasal dari Setoran Bagian Pemerintah, Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Alokasi DBH tersebut untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian yaitu 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Penentuan besar kecilnya DAU yang diterima oleh suatu daerah adalah atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (UU No. 31 Tahun 2004). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah pegawai negeri sipil daerah (UU No. 31 Tahun 2004). Sedangkan proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangen kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Besaran alokasi DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan tanggal 9 Desember 2005. DAU dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Jika penentuan proporsi berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.

Proporsi DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Nilai besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Terdapat 3 kriteria DAK yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis. Pemerintah daerah yang menerima DAK diwajibkan untuk menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Dana Pendamping tersebut dianggarkan dalam APBD.

Besaran alokasi DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan tanggal 9 Desember 2005. Nilai DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN yang dialokasikan sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal neto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus tersebut dihitung melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis kemudian menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

2.2.3. Hasil Audit BPK

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan pemeriksaan adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan tersebut terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, serta laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

2.2.3.1. Temuan Audit

“Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” (Ara dkk, 2016). Setiap temuan audit dapat terdiri dari satu atau

lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian keuangan negara/daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah, pemborosan keuangan negara/daerah atau ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan.

Rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern yaitu:

- a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
- b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja.
- c. Kelemahan struktur pengendalian intern.

Rincian temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari empat klasifikasi yaitu:

- a. Klasifikasi temuan kerugian negara/indikasi kerugian negara,
- b. Klasifikasi temuan administrasi,
- c. Klasifikasi temuan kehematan dan efisiensi, dan
- d. Klasifikasi temuan efektivitas.

2.2.3.2. Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Masdiantini dan Erawati, 2016). Dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini ini dikeluarkan oleh lembaga independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada lima jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, mulai tahun 2015 sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah menjadi lebih banyak yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dimana dalam penyusunan laporan keuangan tersebut sudah berbasis akrual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir (PP RI No. 71 Tahun 2010). Untuk rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih akan diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP RI No. 71 Tahun 2010). Entitas pelaporan harus mengklasifikasikan aset menjadi aset lancar dan non lancar dan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010). Dalam Laporan Arus Kas, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: ekuitas awal; surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan ekuitas akhir (PP RI No. 71 Tahun 2010). Rincian lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas akan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembaca dan pengguna laporan keuangan perlu memahami dan membandingkan antar laporan keuangan. Untuk itu, maka suatu entitas akan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi semua penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam komponen laporan keuangan yang telah disebutkan di atas. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau sering disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengukuran kinerja keuangan baik itu disektor publik maupun sektor privat, yang akan diuraikan pada tabel 2.1 dibawah ini.

TABEL 2.1. DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ramasamy dkk	2005	<i>Firm Size, Ownership, and Performance In The Malaysian Palm Oil Industry</i>	Variabel independennya adalah <i>Firm Size</i> dan <i>Ownership</i> . Variabel dependennya adalah <i>Financial Performance</i>	Variabel <i>firm size</i> (ukuran perusahaan) berpengaruh negatif terhadap <i>financial performance</i> (kinerja keuangan). Perusahaan milik swasta mempunyai kinerja yang lebih baik daripada perusahaan milik pemerintah.
2	Sesotyaningtyas	2012	Pengaruh <i>Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Variabel independennya adalah <i>leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah</i> . Variabel dependennya adalah kinerja keuangan	Variabel <i>leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa.

				pemerintah daerah.	
3	Mustikarini dan Fitriasari	2012	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, temuan audit. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah.	Variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
4	Kusumawardani	2012	Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif, <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel independennya adalah <i>size</i> , kemakmuran, ukuran legislatif, dan <i>leverage</i> . Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel <i>size</i> dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5	Marfiana dan Kurniasih	2013	Pengaruh Karakteristik Pemerintah	Variabel independennya adalah	Variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan

			Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p>karakteristik pemerintah daerah (dengan subvariabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan ukuran legislatif) dan hasil pemeriksaan audit BPK (dengan subvariabel temuan audit BPK dan opini audit BPK). Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>daerah, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p>
6	Utomo	2015	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap	<p>Variabel independennya adalah karakteristik pemerintah daerah (dengan subvariabel</p>	<p>Ukuran pemerintah daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.</p>

			Kinerja Pemerintah Daerah	ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan <i>leverage</i>) dan temuan audit BPK. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.	Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.
7	Susilawati	2016	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah	Variabel ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

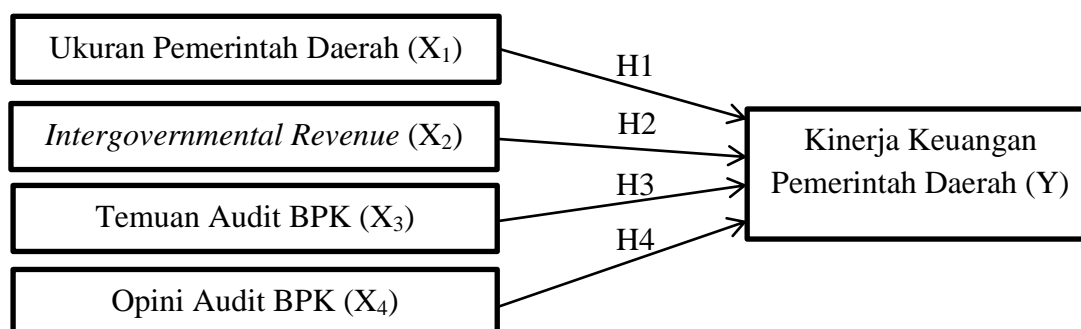
				daerah.	kabupaten/kota.
8	Masdiantini dan Erawati	2016	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan, dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , temuan audit, dan opini audit Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Variabel kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
9	Ara dkk	2016	Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba	Variabel independennya adalah tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK. Variabel dependennya adalah skor	Variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba.

				kinerja pemda kabupaten/kota.	
10	Suryaningsih dan Sisdyani	2016	Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independennya adalah kemakmuran, status daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah, dan opini audit BPK. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.	Variabel kemakmuran dan belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah. Variabel opini audit BPK berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.
11	Noviyanti dan Kiswanto	2016	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, ukuran legislatif, dan temuan audit. Variabel dependennya	Variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

				adalah kinerja pemerintah daerah.	keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--	---	--------------------------------

2.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan hasil audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.



2.7. Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Cooke (1992) perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melaporkan

pengungkapan wajibnya. Kondisi tersebut juga terjadi di dalam pemerintahan daerah. Terkait dengan teori keagenan, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola aset daerah untuk digunakan demi kepentingan publik. Semakin besar aset yang dikelola oleh pemerintah daerah maka tentu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah tersebut. Tekanan tersebut membuat pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai ukuran pemerintah daerah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012), Kusumawardani (2012) dan Utomo (2015). Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyebutkan ukuran pemda berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) juga menjelaskan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh Utomo (2015) bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah semakin besar pula tuntutan agar memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Dari uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

2. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Alokasi pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh *intergovernmental revenue* (Kelly, 2010). Patrick (2007) mengartikan *intergovernmental revenue*

sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Dana transfer tersebut di Indonesia lebih dikenal sebagai dana perimbangan. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah harus membelanjakan pendapatan transfer tersebut sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut peraturan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *intergovernmental revenue* atau tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dilakukan oleh Utomo (2015) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Utomo (2015) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini mendukung hasil penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah.

Semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pendapatan dari pemerintah pusat akan menyebabkan pemerintah daerah tidak terlalu bersemangat untuk menggali potensi PAD yang dimilikinya, pemerintah daerah beranggapan bantuan pendapatan dari pemerintah pusat sudah cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga tidak perlu susah payah menggali PAD lebih banyak. Semakin besar proporsi *Intergovernmental Revenue* dalam suatu pemerintah daerah maka semakin buruk kinerja keuangannya. Dari uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₂ : *Intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

3. Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Marfiana dan Kurniasih (2013) mengartikan temuan audit BPK sebagai hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan/atau pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin rendah pula.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai temuan audit BPK dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012), Marfiana dan Kurniasih (2013), Utomo (2015), Susilawati (2016), dan Ara dkk (2016). Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyebutkan bahwa variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota. Hal senada juga dijelaskan Marfiana dan Kurniasih (2013) yang mengungkapkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2015) bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal senada juga diungkapkan oleh Susilawati (2016) bahwa adanya hubungan negatif antara temuan audit dengan kinerja keuangan pemda. Begitupula hasil penelitian yang dilakukan oleh Ara dkk (2016) yang menunjukkan hasil bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian internal dan/atau pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan maka akan menyebabkan

nilai temuan yang semakin besar. Nilai temuan yang semakin besar dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian keuangan negara/daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah, pemborosan keuangan negara/daerah atau ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan. Sehingga semakin tinggi nilai temuan audit BPK maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Dari uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃ : Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

4. Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran dan kesesuaian LKPD terhadap standar akuntansi yang berlaku. Opini juga ditentukan oleh temuan hasil audit. Semakin sedikit temuan audit maka opini yang diberikan semakin baik. Opini audit BPK dapat menjadi tolok ukur untuk menilai akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai opini audit BPK dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) dan Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Masdiantini dan Erawati (2016) mengungkapkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Hal senada juga diungkapkan oleh Suryaningsih dan Sisdyani (2016) bahwa opini audit BPK berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Opini yang semakin baik menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik pula. Begitupun sebaliknya, opini yang buruk menunjukkan kinerja keuangan yang buruk pula. Opini yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola keuangannya dengan baik. Dari uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₄ : Opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa data keuangan dan data kualitatif yang berupa kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diambil adalah data keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah daerah kabupaten/kota, data temuan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan oleh BPK, dan data opini audit BPK. Data keuangan dan data temuan audit diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan data opini diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016.

3.2. Definisi dan Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Independen

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu terdiri dari:

a. Ukuran Pemerintah Daerah

Penelitian terdahulu yang menggunakan ukuran suatu entitas yang digunakan sebagai variabel pernah dilakukan di sektor swasta oleh Cooke (1992) dan Ramasamy dkk (2005). Cooke (1992) menyebutkan bahwa ukuran dapat diukur dengan beberapa cara. Delapan cara yang dapat digunakan untuk mendefinisikan ukuran adalah *viz. capital stock, turnover, number of shareholders, total assets, current assets, fixed assets, shareholder's funds, dan bank borrowings*. Ramasamy dkk (2005) menggunakan logaritma aset yang berkaitan dengan total *palm oil*. Mustikarini dan Fitriyani (2012) juga menggunakan \ln total aset sebagai proksi ukuran pemerintah daerah. Marfiana dan Kurniasih (2013) menyebutkan variabel ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset. Menurut Hidayat dan Isroah (2016) nilai dari ukuran perusahaan dapat diperoleh dari total aset perusahaan karena nilai aset cenderung lebih stabil. Nilai total aset masing-masing pemerintah daerah memiliki selisih yang besar antar pemerintah daerah, hal ini dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Oleh karena itu, dalam penelitian ini variabel ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan logaritma (\ln) total aset dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

b. *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental Revenue atau yang sering kita kenal sebagai dana perimbangan, merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sesotyaningtyas (2012) menyebutkan *intergovernmental revenue* dapat dihitung dengan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) yang menjelaskan bahwa *intergovernmental revenue* merupakan hasil dari total dana perimbangan dibagi dengan total pendapatan. Dalam penelitian ini variabel *intergovernmental revenue* didefinisikan dengan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan.

Intergovernmental Revenue dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

c. Temuan Audit BPK

Ara dkk (2016) menyebutkan temuan audit BPK adalah kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap sistem pengendalian intern dan/atau terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, suatu temuan audit dapat terdiri dari satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyebutkan temuan audit BPK dihitung dengan membandingkan antara temuan audit (dalam rupiah) dengan total

anggaran belanja. Definisi temuan audit tersebut digunakan oleh Utomo (2015) yang menjelaskan bahwa temuan audit diukur dengan temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Dalam penelitian ini variabel temuan audit didefinisikan dengan perbandingan antara temuan audit (dalam rupiah) dengan total anggaran belanja.

Temuan audit dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Temuan audit} = \frac{\text{Temuan Audit (dalam Rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

d. Opini Audit BPK

Masdiantini dan Erawati (2016) menyebutkan opini dapat didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Angelina dan Irsutami (2012) menyebutkan opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Dalam penelitian ini variabel opini audit BPK diproksikan dengan 5 jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK.

Dalam penelitian ini variabel opini audit didefinisikan dengan memberikan nilai skala 5 pada masing-masing jenis opini. Dengan uraian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1. NILAI OPINI AUDIT

Opini Audit BPK atas LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3

Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sesotyaningtyas (2012) menyebutkan rasio efisiensi dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja, begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio efisiensi maka menunjukkan kinerja yang baik. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *Value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4). Masdiantini dan Erawati (2016) menyebutkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan empat rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Rasio kemandirian daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri (Mahsun, 2016:152).

Mahsun (2016:179) mendefinisikan ekonomi sebagai cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalisir kerugian dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia (Mahsun, 2016:179). Masih menurut Mahsun (2016:179) yang mengartikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan.

Mahsun (2016:153) mengatakan formula yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian adalah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2016:186) formula yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Mahsun (2016:187) menyatakan formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi adalah

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Mahsun (2016:187) juga menyatakan formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) juga menggunakan formula yang digunakan oleh Mahsun (2016). Dalam penelitian ini variabel kinerja keuangan pemerintah daerah diproksikan dengan menggunakan empat rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena lebih kompleks. Dengan menggunakan formula yang akan dijabarkan dalam pengukuran variabel.

3.3. Pengukuran Variabel

TABEL 3.2. PENGUKURAN VARIABEL

No	Variabel	Sub Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran
1	Ukuran Pemerintah Daerah		Ukuran dari pemerintah daerah yang diukur melalui nilai total aset dalam neraca.	Nominal	Logaritma (Ln) total aset
2	<i>Intergovernmental Revenue</i>		Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.	Rasio	$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$
3	Hasil audit BPK	Temuan audit	Kasus pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap sistem pengendalian intern dan/atau terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Rasio	$\frac{\text{Temuan Audit (dalam Rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$
		Opini audit	Pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	Skala	Opini audit BPK diberi nilai antara 1 sampai dengan 5
4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan	Rasio	$\frac{\text{PAD}}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman}}$

			pemerintahan sendiri.		
		Rasio Ekonomi	Tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah.	Rasio	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran Anggaran}}{\text{Pengeluaran}}$
		Rasio Efisiensi	Tingkat input dari pemerintah daerah terhadap tingkat outputnya.	Rasio	$\frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$
		Rasio Efektivitas	Tingkat output dari pemerintah daerah terhadap target-target pendapatan.	Rasio	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dalam rentang waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 72 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011 sampai dengan 2015. Metode pengambilan sampel berbasis pada probabilitas (*probability sampling*) atau pemilihan secara random dengan sistem random sederhana (*simple random*).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan data temuan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016. Data keuangan dalam LKPD yang digunakan diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari BPK RI. Data temuan yang digunakan diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari BPK RI. Data opini audit diambil dari data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016 yang diperoleh melalui website www.bpk.go.id.

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Winarno (2015:1.28) statistika deskriptif merupakan analisis paling sederhana dalam statistik. Ghozali (2011:19) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Menurut Hartono (2016:195) statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik ini menyediakan nilai frekuensi, pengukur tendensi pusat, dispersi, dan pengukur-pengukur bentuk.

Dengan analisis statistik deskriptif yang mengubah data mentah menjadi informasi maka akan diperoleh gambaran dan informasi yang mendeskripsikan fenomena atau karakteristik data.

3.6.2. Analisis Faktor

Dalam penelitian ini, variabel dependen berupa kinerja keuangan pemerintah daerah diproksikan dengan empat rasio yaitu rasio kemandirian, rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian asumsi klasik maka perlu didapatkan satu data untuk variabel dependennya guna kepentingan pengujian model regresi berganda. Peneliti melakukan analisis faktor dengan menggunakan metode *principal components* sehingga akan dihasilkan skor faktor yang akan menjadi data variabel dependennya.

Menurut Ghozali (2011:394) cara menentukan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah melihat matrik korelasi secara keseluruhan. Untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel maka digunakan uji *Bartlett test of sphericity*. Uji lain yang dapat digunakan untuk melihat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor yaitu dengan menggunakan *Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy* (KMO MSA). Uji analisis validitas faktor dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 21 karena lebih mudah dipahami dan mempunyai kriteria yang lebih jelas.

3.6.3. Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan regresi data panel (*panel pooled data*) untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk pengujian ini digunakan alat uji statistik dengan bantuan *software* Eviews 8. Dalam mengestimasi model regresi data panel dapat digunakan tiga teknik uji regresi yaitu *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (Nachrowi dan Usman, 2006:317). Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel.

3.6.3.1. Chow Test

Chow test digunakan untuk memilih antara model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect* dengan model *fixed effect* yang paling tepat digunakan untuk estimasi data panel. Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut:

H0 = Pilih model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*

H1 = Pilih model *Fixed effect*

Jika nilai *probability Cross-section Chi-square* lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima artinya model yang dipilih adalah model *fixed effect*. Tetapi jika nilai *probability Cross-section Chi-square* lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima artinya model yang dipilih adalah model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*.

3.6.3.2. Hausman Test

Hausman test digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dengan model *random effect* yang paling tepat digunakan untuk estimasi data panel. Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut:

H0 = Pilih model *Random effect*

H1 = Pilih model *Fixed effect*

Jika nilai *probability Cross-section random* lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima artinya model yang dipilih adalah model *fixed effect*. Tetapi jika nilai *probability Cross-section random* lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima artinya model yang dipilih adalah model *random effect*.

3.6.3.3. Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier (LM) test digunakan untuk menentukan apakah model *random effect* lebih baik daripada model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect* untuk mengestimasi data panel. Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut:

H0 = Pilih model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*

H1 = Pilih model *Random effect*

Jika nilai *probability Cross-section Breusch-Pagan* lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima artinya model yang dipilih adalah model *random effect*. Tetapi jika nilai *probability Cross-section Breusch-Pagan* lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima artinya model yang dipilih adalah model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*.

3.6.4. Pengujian Asumsi Klasik

3.6.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk melakukan pengujian data observasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Data yang dapat digunakan untuk pengujian model regresi adalah data yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak akan menggunakan alat uji yang berupa uji *Jarque-Bera*. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan *probability value Jarque-Bera* yang diperoleh dengan pedoman pengambilan keputusan dimana jika *probability value* lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika *probability value* lebih kecil dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.

3.6.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi data panel, maka peneliti akan melihat nilai matriks korelasi. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai matriks masing-masing variabel independen dengan kriteria jika nilai matriks lebih kecil dari 0,90 maka tidak terjadi multikolinieritas, tetapi jika nilai matriks lebih besar dari 0,90 maka terjadi multikolinieritas.

3.6.4.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian masalah autokorelasi akan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Dengan kriteria jika nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari nilai batas atas (du) dan kurang dari $4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi baik itu korelasi positif maupun korelasi negatif.

3.6.4.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, maka digunakan alat uji *White* dengan bantuan program Eviews 8. Uji *White* dihitung dengan kriteria jika *probability value Obs*R-squared* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas tetapi jika *probability value Obs*R-squared* lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.5. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda, dimana terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$KNJ_{it} = \alpha + \beta_1 Ln_SIZE + \beta_2 IR + \beta_3 TMN + \beta_4 OPN + e$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda

KNJ _{it}	= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Ln_SIZE	= Ukuran Pemerintah Daerah
IR	= <i>Intergovernmental Revenue</i>
TMN	= Temuan Audit BPK
OPN	= Opini Audit BPK
α	= Konstan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
e	= <i>Error</i>

3.6.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Langkah-langkah dalam analisis pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

3.6.6.1. Uji Signifikansi - F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependennya. Kriteria dalam uji signifikansi-F adalah jika *probability value* yang dihasilkan lebih besar dari 5% atau 0,05 maka

dapat dikatakan bahwa model tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya, jika *probability value* yang dihasilkan lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model layak (*fit*) untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

3.6.6.2. Pengujian Koefisien Regresi (uji signifikansi - t)

Pengujian ini adalah pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji signifikansi-t menggunakan tingkat signifikansi 5%, sehingga kriteria pengambilan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1) H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau *probability value* $> 0,05$, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *probability value* $< 0,05$, yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berguna untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel independen dan untuk menghitung seberapa besar peranan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilihat dari hasil pengujian regresi berganda. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai koefisien determinasi (R^2) yang besar mendekati satu menandakan bahwa variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini berarti semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan total aset yang besar akan mampu menjalankan kegiatan operasional pemerintahan dengan baik dan dapat lebih leluasa memanfaatkan nilai aset yang besar tersebut untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dengan baik. Terlihat dari besarnya nilai belanja pegawai/belanja aparatur daerah yang lebih besar dan tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik yang dilakukan oleh

pemerintah kabupaten/kota tersebut. Sehingga tujuan utama dari pemberian *intergovernmental revenue* tidak tercapai.

3. Berdasarkan hasil penelitian ini temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini berarti semakin besar jumlah temuan audit BPK pada pemerintah daerah maka patut diduga mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang semakin besar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya masih rendah.
4. Berdasarkan hasil penelitian ini opini audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini berarti semakin baik opini audit yang diperoleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan telah terhindar dari penyimpangan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat diharapkan memberikan pengawasan yang lebih intensif terhadap pemanfaatan dana perimbangan. Karena pemanfaatan dana perimbangan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum

tepat sasaran sehingga tujuan utama dari pemberian dana perimbangan tidak tercapai.

2. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan nilai total asetnya. Dengan total aset yang semakin besar, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkannya untuk meningkatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah sehingga akan meningkatkan kinerja keuangannya. Salah satu caranya dengan mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana, selain akan meningkatkan nilai aset tetap juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat.
3. Pemerintah daerah diharapkan harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerahnya karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah akuntansi saja tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
4. Masyarakat diharapkan tetap memantau kinerja pemerintah daerah dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik. Karena tekanan dari masyarakat mampu mendorong pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik.

5.2.1. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sehingga daya generalisirnya hanya satu provinsi saja.
2. Penelitian ini menguji data tanpa membaginya dalam kriteria tertentu seperti opini audit yang diperoleh dan status daerah sehingga analisis dari penelitian hanya terbatas pada pengujian kinerja tanpa melihat apakah daerah tersebut

merupakan hasil pemekaran atau non pemekaran, dan apakah daerah tersebut mendapatkan opini WTP atau tidak, serta kriteria lainnya.

5.2.2. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Menambah beberapa variabel lain yang memiliki hubungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai *adjusted R square* seperti tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, dan ukuran legislatif.
2. Menggunakan sampel penelitian data laporan keuangan daerah seluruh Indonesia agar mempunyai daya generalisir yang lebih luas.
3. Membagi sampel penelitian menjadi beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu seperti opini audit yang diperoleh dan status daerah sehingga data lebih relevan dan reliabel.

Daftar Pustaka

- Angelina, Novita, dan Irsutami. 2012. Hubungan Antara Opini Audit Atas Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal. Politeknik Negeri Batam*.
- Ara, Samuel Christian, Titiek Herwanti, dan Endar Pituringsih. 2016. Pengaruh Katakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. *JAFFA*, 04(1):1-17.
- Badan Pemeriksa Keuangan. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016". <http://www.bpk.go.id/>. diakses tanggal 29 Januari 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. "Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2015". <http://lampung.bps.go.id/>. diakses tanggal 29 Januari 2016.
- Broadbent, J., Michael Dietrich, dan Richard Laughlin. 1996. The Development Of Principal – Agent , Contracting and Accountability Relationships In The Public Sector : Conceptual And Cultural Problems. *Critical Perspectives on Accounting*, 7:259 – 284.
- Cooke, T. E. (1992). The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports Of Japanese Listed Corporations. *Accounting and Business Research*, 22(87):229-237.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gianakis, Gerasimos A. 2002. The Promise Of Public Sector Performance Measurement: Adodyne or Placebo?. *Public Administration Quarterly*, 26(1/2):35-64.
- Halachmi, Arie. 2005. Performance Measurement is Only one way of Managing Performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 54(7):502-516.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFEE.
- Hidayat, Shodiq Nur dan Isroah. 2016. Pengaruh Karakteristik Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Inflasi Terhadap Return. *Jurnal Profita*, 6.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3:305-360.
- Kelly, Roy. 1999. Intergovernmental Revenue Allocation Theory and Practice: an Application to Nepal. *Asian Journal of Public Administration*, 21(1):86-113.

- Kementerian Dalam Negeri. "Postur APBD Tahun 2015". <http://keuda.kemendagri.go.id> (diakses tanggal 13 Desember 2016).
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi*, 9(1):41-62.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfiana, N. dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- Masdiantini, P. R. dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14:1150-1182.
- Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4):739-777.
- Mustikarini, Widya Astuti, and Debby Fitriyani. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Forum: Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. 15.
- Nachrowi, N. D. & Usman, H. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Noviyanti, Nur Ade dan Kiswanto. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Patrick, Patricia A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Ramasamy, B., D. Ong, dan M. C. H. Yeung. 2005. Firm Size, Ownership and Performance in The Malaysian Palm Oil Industry. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 1:81-104.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 126. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 137. Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Udangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2016, Nomor 1203. Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Udangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1):1-94
- Sularso, Havid, dan Restianto, Yanuar E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1(2).
- Suryaningsih, Ni Made dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2):1453-1481.
- Susilawati, Ponco. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Utomo, Kharis Prasetyo. 2015. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.